

DAMPAK BREXIT TERHADAP PERDAGANGAN INGGRIS DENGAN UNI EROPA TAHUN 2021

Rosna¹

Abstract: Britain has good cooperative relations with the European Union, especially in the field of trade in goods and services. However, in 2016, Britain held a referendum on leaving the European Union which was influenced by three factors that are trading deficit, great contribution burden, immigration problem. The analysis method used is descriptive research with secondary data. The approach that used in this research are Liberal Economic Theory by Razzen Sally and the Economic Integration Theory by T. Balassa. The results of this research indicate that the impact of Brexit on UK trade with the European Union in 2021 does not have a major influence on trade in goods and services because of the agreement reached between the UK and the European Union in the new agreement and cooperation which stipulates that access to trade follows fair free trade and sustainable post-Brexit. Based on the agreement, access to trade in goods will be subject to zero tariffs and zero quotas for all goods in accordance with the rules of origin of each country and for trade in services, the UK will follow the general rules of free trade in accordance with the WTO principles.

Keywords: Trade, Brexit, European Union, goods and services

Pendahuluan

Brexit (*Britain Exit*) merupakan keputusan Inggris untuk melaksanakan referendum keluar dari Uni Eropa. Referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa dilaksanakan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron pada tanggal 23 Juni 2016 dan hasilnya adalah Inggris keluar dari Uni Eropa dengan perolehan suara sebanyak 51,9% (17.410.724 orang) memilih untuk meninggalkan Uni Eropa dan 48,1% (16.141.241 orang) memilih untuk tetap bertahan dalam Uni Eropa (BBC News, 2016). Keputusan Inggris untuk melaksanakan referendum keluar dari Uni Eropa dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya tiga faktor, antara lain yaitu masalah beban kontribusi Inggris ke Uni Eropa terlalu besar, dan masalah imigran yang masuk ke Inggris meningkat dan defisit perdagangan. Ketiga faktor ini akhirnya mendorong Inggris untuk mengadakan referendum keluar dari Uni Eropa.

Selama menjadi anggota Uni Eropa, Inggris harus membayar iuran atau memberikan kontribusi ke anggaran Uni Eropa. Anggaran Eropa tersebut diajukan setiap tahun oleh komisi Eropa dan disepakati melalui mufakat seluruh negara anggota. Dalam anggaran UE, Inggris menanggung biaya kontribusi yang sangat besar sedangkan manfaat yang diterimanya dari anggaran tersebut sangat sedikit karena Inggris merupakan negara yang memiliki perekonomian yang baik sehingga UE hanya mengeluarkan sedikit untuk kepentingan Inggris dalam penggunaan anggaran tersebut dibandingkan kontribusi nasionalnya ke UE. Dalam anggaran Uni Eropa, Inggris merupakan Negara yang menyumbang iuran terbesar keempat setelah Jerman, Perancis, dan Italia dalam anggaran Uni Eropa pada tahun 2013 dengan kontribusi sebesar 17.068 juta euro. Kemudian pada tahun 2015, Inggris menduduki peringkat kedua setelah Jerman dengan kontribusi sebesar 21.409 juta euro (Jonathan Athow, 2019).

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rosna2597@gmail.com

Faktor kedua yakni Imigrasi yang menjadi faktor utama dalam referendum Brexit tahun 2016. Hal ini didorong oleh kekhawatiran masyarakat Inggris terhadap imigran yang semakin banyak masuk ke Inggris yang dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Inggris terutama berkurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal di Inggris yang diambil alih oleh tenaga kerja imigran. Selain itu, adanya kesenjangan sosial antara para imigran dan masyarakat Inggris yang memicu terjadinya tindakan kriminalitas (Hardi Alunaza SD dan Virginia Sherin, 2018 (hal 161-162)).

Selama menjadi bagian dari Uni Eropa, Inggris memiliki hubungan yang erat dengan Uni Eropa yang berkontribusi besar terhadap perekonomian kedua negara tersebut. Khususnya dalam bidang perdagangan yang terus mengalami peningkatan setiap tahun. Akan tetapi, perdagangan Inggris disektor barang mengalami defisit akibat meningkatnya permintaan masyarakat Inggris terhadap barang produk yang berasal dari anggota Uni Eropa terutama Jerman, Perancis, dan Belanda. Hal ini tentunya merugikan negara Inggris karena pengeluaran negara akan lebih besar dibandingkan pendapatan dalam negeri. Sedangkan untuk perdagangan jasa Inggris mengalami surplus dengan Uni Eropa yang didorong oleh eksistensi Inggris sebagai penyedia utama layanan jasa di Uni Eropa (Alen Mulabdic, Alberto Osnago, and Michele Ruta, 2017 (hal 9)).

Berdasarkan ketiga faktor tersebut. Akhirnya mendorong masyarakat Inggris untuk melaksanakan referendum keluar dari Uni Eropa yang ditegaskan dalam negosiasi Brexit sejak tahun 2016 dan secara resmi meninggalkan Uni Eropa pada tanggal 31 Januari 2020. Kemudian Inggris mengalami masa transisi selama 11 bulan untuk menentukan hubungan baru dalam perdagangannya dengan Uni Eropa dan Inggris secara resmi meninggalkan Pasar Tunggal dan Serikat Pabean pada tanggal 1 Januari 2021. Akibatnya semua hak dan kewajiban Inggris sebagai negara anggota Uni Eropa telah berakhir. Akan tetapi, Inggris dan UE telah berhasil membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dengan ketentuan tarif nol dan kuota nol untuk semua barang yang mengikuti standar keamanan Negara asal masing-masing. Sedangkan untuk perdagangan jasa akan diatur melalui prinsip *World Trade Organization* tanpa menghilangkan kerjasama yang berkelanjutan antara Inggris dengan Uni Eropa dalam perdagangan jasa meskipun masyarakat Inggris tidak lagi memiliki kebebasan penuh ke Pasar Tunggal pasca Brexit. (*EU-UK Trade and Cooperation Agreement, 2020*). Oleh karena itu, artikel ini akan menjelaskan dampak Brexit terhadap perdagangan Inggris dengan Uni Eropa.

Kerangka Teori

Teori Ekonomi Liberal

Ekonomi liberal adalah segala sesuatu yang diserahkan kepada pasar berdasarkan hukum *supply and demand* (penawaran dan permintaan). Dimana Para pelaku ekonomi diberi hak untuk bersaing dan memiliki strategi dalam memenangkan persaingan produksi suatu produk serta memasarkan produk; sedangkan negara atau pemerintah berperan sebagai pelindung dan fasilitator atau penengah yang menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi supaya berjalan dengan baik. Pemerintah tidak memiliki hak untuk membuat regulasi dan kebijakan yang dapat menghalangi kegiatan pasar atau perekonomian. Dalam liberalisme, pemerintah harus memberikan kebebasan untuk mekanisme pasar bekerja, melakukan deregulasi dengan mengurangi *restriksi* (hambatan) pada proses produksi, mencabut semua rintangan birokrasi perdagangan,

dan menghilangkan tarif bagi perdagangan untuk menjamin terbentuknya *free trade* (Razzen Sally, 1998 (hal 3)).

Teori Ekonomi Liberal berkaitan erat dengan tingkat permintaan dan penawaran hasil produksi barang dan jasa suatu negara dengan persaingan yang ketat antar negara. Inggris sebagai negara yang memiliki tingkat permintaan dan penawaran yang cukup tinggi dalam keanggotaan Uni Eropa memutuskan untuk meninggalkan Pasar Tunggal. Keputusan Inggris ini mempengaruhi permintaan dan penawaran dari negara-negara anggota Uni Eropa terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan oleh Inggris, akibat dari Brexit permintaan dan penawaran jasa Inggris akan mengalami peningkatan harga karena mengikuti peraturan perdagangan bebas sesuai dengan prinsip WTO sementara perdagangan barang akan mengalami pemeriksaan yang ketat di wilayah perbatasan mengenai standar kesehatan dan keamanan produk yang akan di perdagangkan. Hal ini mengakibatkan hambatan dalam perdagangan di berlakukan kembali sehingga barang dan jasa akan mengalami kenaikan harga serta mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap barang Inggris oleh anggota negara Uni Eropa.

Teori Integrasi Ekonomi

Menurut T. Balassa integrasi ekonomi adalah suatu proses penghapusan diskriminasi atau hambatan-hambatan dalam perdagangan antar negara yang berpartisipasi dalam integrasi tersebut. Integrasi ekonomi mencakup berbagai bentuk tingkat integrasinya yaitu area perdagangan bebas, serikat pabean, pasar bersama, serikat ekonomi. Integrasi ekonomi juga menghapus pembatasan tarif antar negara yang berpartisipasi dalam perdagangan bebas, namun negara anggota juga berhak untuk mempertahankan tarifnya terhadap non-anggota (Ali M. EL-Agraa, 1989). Selain itu, terbentuknya integrasi ekonomi total menyatukan kebijakan moneter, fiskal, sosial dalam membentuk suatu kebijakan otoritas supra-nasional yang mengikat negara-negara anggota. Beberapa tahapan integrasi ekonomi berdasarkan intensitas integrasi, yaitu :

a) *Free Trade Area (FTA)*

Free trade area merupakan kesepakatan antar dua negara atau lebih untuk menghapus seluruh hambatan-hambatan perdagangan dalam bentuk tarif maupun non tarif berlaku untuk semua barang yang diperdagangkan;

b) *Customs Union (CU)*

Costums union merupakan kesepakatan antar negara untuk menghapus semua kewajiban impor dan hambatan-hambatan perdagangan dalam bentuk tarif maupun non tarif berlaku untuk semua barang dan jasa yang diperdagangkan;

c) *Common Market (CM)*

Common market merupakan suatu kondisi dimana CU plus mengizinkan adanya perpindahan bebas bagi seluruh faktor produksi antar negara anggota.

d) *Economic Union (EU)*

Economic union merupakan suatu kondisi dimana CM plus memiliki harmonisasi dalam kebijakan-kebijakan makroekonomi nasional antar negara anggota.

e) *Total Economic Integration (TEI)*

Total economic integration merupakan penyatuan kebijakan makroekonomi maupun sosial yang bersifat “supra nasional” dengan kewenangan yang cukup luas dan mengikat semua negara anggota.

Teori integrasi ekonomi ini digunakan untuk menjelaskan proses integrasi Uni Eropa yang meliputi penghapusan diskriminasi dengan adanya kebebasan untuk

melakukan transaksi antar negara anggota yang dapat mempermudah untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Pasca Brexit, hambatan-hambatan dalam perdagangan akan diberlakukan kembali dengan adanya pengetatan keluar masuknya barang di perbatasan Inggris dengan negara-negara Uni Eropa dan sistem perdagangan akan menyesuaikan dengan peraturan *World Trade Organization* (WTO) dalam perdagangan bebas yang disepakati dalam perjanjian perdagangan dan kerjasama antara Inggris dengan Uni Eropa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dampak dari suatu fenomena yang terjadi berdasarkan keputusan suatu negara yang melibatkan hubungan masa depan kedua negara tersebut. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, media massa, akses internet dan sejumlah literatur yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis data kualitatif yang mencakup reduksi data, analisis, interpretasi data dan trigulasi, dari hasil analisis sejumlah data yang berhasil dikumpulkan, kemudian penulis akan menyajikan hasil penelitian menggunakan teori sebagai dasar penting dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Inggris bergabung dalam keanggotaan *European Economic Community* (EEC) pada tahun 1973, selama bergabung, Inggris mendapatkan berbagai keuntungan dan kemudahan dalam bidang perdagangan seperti adanya penghapusan hambatan-hambatan tariff bea cukai dalam mengekspor barang dan jasa ke negara anggota EEC. Kemudahan ini membuat perdagangan Inggris mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 1992 dengan persentase 44% dari 21% pada tahun 1973 diawal bergabung dalam keanggotaan EEC (*EU Briefings*, 2008).

Pada perkembangannya, anggota EEC akhirnya menandatangani sebuah perjanjian Maastricht yang mengubah *European Economic Community* (EEC) menjadi *European Union* (EU) yang diberlakukan pada 1 November 1993. Perjanjian ini telah mendorong terciptanya integrasi dalam bidang Ekonomi dan moneter yang berdampak besar terhadap perdagangan Inggris dalam jangka waktu panjang. Sejak EEC bertransformasi menjadi Uni Eropa, Inggris mengalami permasalahan dalam perdagangan yakni terjadinya defisit neraca perdagangan akibat impor barang dari Uni Eropa ke Inggris meningkat sementara ekspor Inggris lebih rendah ke Uni Eropa (WTO, 1995).

Tercatat sejak tahun 1993 ekspor Inggris ke Uni Eropa sebesar €78,5 Miliar, dan meningkat pada tahun 2015 sebesar €225, 6 Miliar. Sedangkan impor Inggris dari Uni Eropa sebesar €88,5 Miliar dan meningkat lebih besar pada tahun 2015 yakni sebesar €293,8 Miliar (Matthew Ward, 2020 (hal 9)). Defisit perdagangan ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat Inggris terhadap produk barang dari Uni Eropa sementara Inggris hanya mengekspor sedikit barang ke Uni Eropa. Hal ini tentunya merugikan negara Inggris karena pengeluaran negara akan lebih besar dibandingkan pendapatan dalam negeri. Selain masalah defisit, Inggris juga memiliki beban kontribusi yang besar ke Uni Eropa dan masalah imigran yang berdatangan ke Inggris terus meningkat.

Permasalahan yang dihadapi Inggris ini akhirnya memunculkan ide penarikan diri Inggris dari keanggotaan Uni Eropa yang digelar pada tanggal 23 Juni 2016 yang dikenal dengan istilah Brexit yang di pelopori oleh PM David Cameron dengan perolehan suara terbanyak memilih meninggalkan Uni Eropa. Meskipun referendum Brexit telah digelar. Langkah selanjutnya Inggris harus membuat kesepakatan untuk membentuk sebuah hubungan baru dimasa depan dengan Uni Eropa berdasarkan traktat Lisbon pasal 50 berupa perjanjian penarikan diri Inggris dari UE, Perjanjian dalam hubungan baru dengan UE, perjanjian hubungan dagang baru dengan sejumlah negara non-UE (*EU Referendum : UK votes to leave the EU*, 2016).

Kesepakatan perjanjian hubungan kerjasama baru yang akan dicapai oleh Inggris dan UE dibatasi dalam kurun waktu setahun telah menyepakati hubungan dagang yang berkaitan dengan lalu lintas barang tanpa mencakup sektor jasa. Akan tetapi, jika kesepakatan dagang antara Inggris dan UE tidak tercapai hingga berakhirnya masa transisi maka lalu lintas barang akan diatur dalam kerangka organisasi perdagangan dunia (WTO). Masa transisi berakhir, kesepakatan perdagangan dan kerjasama antara Inggris dengan UE telah disepakati pada 24 Desember 2020. Kesepakatan ini telah mengubah hubungan perdagangan Inggris dengan UE yang menghasilkan satu pilar utama yakni: Perjanjian Perdagangan Bebas: kemitraan ekonomi dan sosial baru dengan Inggris Raya (*European Commission*, 2020).

Keputusan Inggris untuk meninggalkan UE berdampak besar terhadap perdagangan Inggris karena UE merupakan mitra dagang terbesar Inggris sehingga dampak Brexit akan sangat mempengaruhi hubungan perdagangan kedua belah pihak. Adapun dampak brexit terhadap perdagangan Inggris dengan UE dapat diuraikan sebagai berikut:

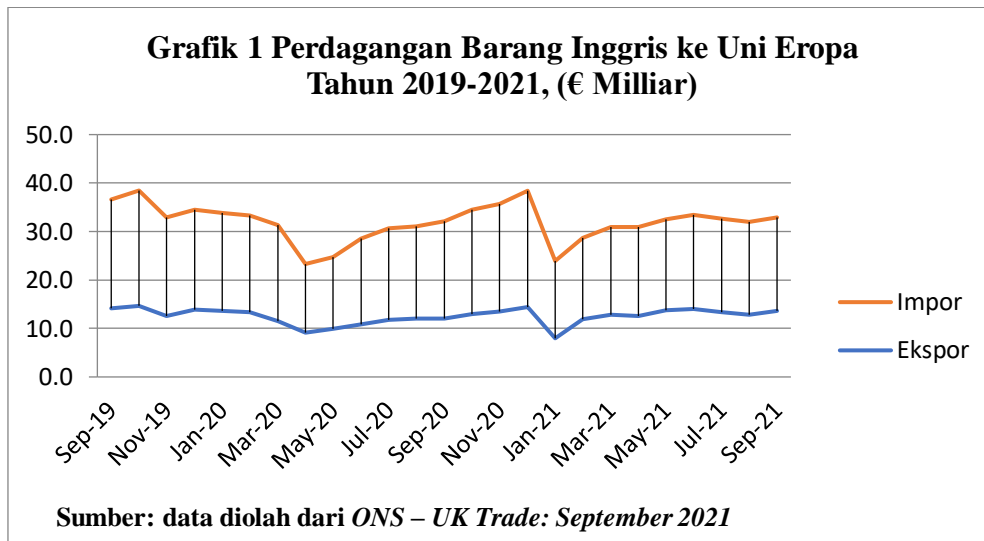
1. Dampak Brexit terhadap Perdagangan Barang

Inggris dengan Uni Eropa telah menyepakati sebuah perjanjian perdagangan yang berbeda dengan kebijakan *economic integration* di kawasan Uni Eropa. Perjanjian perdagangan baru antara Inggris dengan Uni Eropa ini telah disepakati pada tanggal 24 Desember 2020 yang membentuk mekanisme pasar bebas bagi sektor barang yang akan diperdagangkan dengan ketentuan tariff nol dan kuota nol bagi seluruh barang sesuai dengan isi perjanjian dalam perlakuan nasional dan akses pasar barang (termasuk *trade remedies*) dalam *Article XX of UK-EU TCA 2021*. (*European Commission*, 2020)

Dalam kesepakatan perjanjian perdagangan tersebut memiliki tujuan yang sama dengan *free trade area* yakni dalam akses perdagangan barang yang tidak akan dikenakan hambatan tarif untuk semua barang. Kesepakatan ini mendapat dukungan yang cukup besar dari anggota Uni Eropa karena Uni Eropa hanya memiliki surplus perdagangan barang dengan Inggris. Sementara, dalam perdagangan jasa mengalami defisit, sehingga jauh lebih sedikit alasan bagi Uni Eropa untuk menyepakati perjanjian liberal untuk akses perdagangan jasa dibandingkan perdagangan barang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akses perdagangan barang Inggris ke Uni Eropa tidak akan terlalu berpengaruh pasca Brexit. (*European Movement International*, 2016).

Inggris meninggalkan Uni Eropa dengan tujuan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan barang yang dihadapi oleh Inggris selama menjadi anggota Uni Eropa. Defisit perdagangan ini tidak dapat dihindari karena permintaan masyarakat Inggris terhadap barang yang di produksi oleh Uni Eropa tetap meningkat setiap tahunnya. Namun, dengan meninggalkan Uni Eropa, Inggris dapat mengurangi sedikit

ketergantungan terhadap barang produksi Uni Eropa yang membantu mengurangi defisit neraca perdagangan Inggris yang dapat dilihat pada grafik berikut:



Data diatas menunjukkan bahwa perdagangan barang Inggris mengalami penurunan yang cukup signifikan pada awal tahun 2021 pasca Brexit, yang mana ekspor barang telah menurun sebesar €5,715 miliar ke Uni Eropa pada Januari 2021. Sedangkan impor barang juga mengalami penurunan sebesar €6,901 miliar pada Januari 2021. Pasca Brexit defisit perdagangan barang Inggris telah berkurang sekitar €1,186 miliar pada Januari 2021. (Hannah Donnarumma, 2021). Akan tetapi, perdagangan barang Inggris dengan Uni Eropa tetap mengalami defisit pasca brexit. Penurunan nilai ekspor maupun impor barang yang terjadi pada tahun 2021 disebabkan oleh ketidakpastian Brexit yang berlangsung selama bertahun-tahun serta pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung sehingga Inggris mengurangi jumlah pasokan barang dari maupun ke Uni Eropa. Sementara pada bulan Februari hingga September perdagangan Inggris mengalami pemulihan dari kemerosotan pada bulan Januari, akan tetapi nilai ekspor barang Inggris ke Uni Eropa tetap lebih rendah dibandingkan dengan impor barang dari Uni Eropa atau tetap mengalami defisit. (John Springford, 2021 (hal 2))

Dalam perdagangan barang, beberapa komoditas utama Inggris dengan Uni Eropa lebih dominan di impor dibandingkan di ekspor. Hal ini membuktikan bahwa keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa tidak membawa perubahan bagi perdagangan barang Inggris agar menjadi surplus perdagangan. Akan tetapi, Brexit hanya mengurangi sedikit nilai impor barang dari Uni Eropa ke Inggris untuk membatasi pasokan barang yang berlebihan masuk ke Inggris (Dean Scott, 2021). Adapun komoditas ekspor dan impor barang Inggris dengan Uni Eropa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Komoditas Barang Inggris dengan Uni Eropa tahun 2019-2021 (€ Milliar)										
Tahun	Makanan & Hewan hidup		Bahan Bakar		Bahan Kimia		Bahan Manufaktur		Mesin & Peralatan Transportasi	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
Sep-19	1,0	2,4	1,9	0,7	2,2	3,5	1,4	2,7	5,1	9,2
Oct-19	1,0	2,6	1,9	0,8	2,5	4,3	1,5	2,5	5,1	9,3
Nov-19	0,7	2,2	1,7	0,7	1,9	3,2	1,2	2,4	4,7	8,2
Dec-19	0,8	2,3	2,3	0,7	2,4	3,2	1,3	2,4	4,9	8,4
Jan-20	0,9	2,4	1,9	0,6	2,2	3,3	1,4	2,3	4,9	7,7
Feb-20	0,8	2,3	2,0	0,4	2,3	3,0	1,4	2,3	4,6	8,0
Mar-20	0,8	2,4	1,3	0,5	2,3	3,4	1,3	2,4	3,8	7,4
Apr-20	0,8	2,4	1,0	0,3	2,2	3,2	1,0	1,6	2,4	4,0
May-20	0,8	2,4	1,1	0,2	2,3	3,2	1,1	1,6	2,8	4,6
Jun-20	0,8	2,4	1,1	0,4	2,0	3,1	1,1	2,2	3,7	6,3
Jul-20	0,9	2,3	1,4	0,4	2,1	3,1	1,2	2,2	3,9	7,2
Aug-20	0,9	2,3	1,3	0,4	2,2	3,1	1,4	2,0	4,1	7,2
Sep-20	0,9	2,4	1,2	0,4	2,2	3,0	1,2	2,3	4,2	7,9
Oct-20	0,8	2,4	1,3	0,5	2,5	3,4	1,4	2,4	4,4	8,8
Nov-20	0,9	2,5	1,3	0,4	2,6	4,2	1,6	2,4	4,6	8,5
Dec-20	1,0	2,6	1,4	0,5	3,0	4,2	1,7	2,7	4,7	9,6
Jan-21	0,4	1,9	1,2	0,4	1,2	2,7	0,9	1,8	2,9	6,0
Feb-21	0,6	2,1	1,5	0,5	2,1	2,7	1,3	2,1	4,4	6,1
Mar-21	0,7	2,1	1,3	0,5	2,5	2,9	1,4	2,3	4,7	6,8
Apr-21	0,8	2,0	1,0	0,5	2,3	3,0	1,5	2,3	4,6	7,0
May-21	0,9	2,1	1,5	0,6	2,6	3,2	1,7	2,3	4,7	6,9
Jun-21	0,8	2,2	1,3	0,7	3,4	3,3	1,6	2,4	4,5	7,2
Jul-21	0,8	2,2	1,5	0,8	2,4	3,5	1,6	2,4	4,8	6,8
Aug-21	0,8	2,1	1,5	0,8	2,5	3,3	1,5	2,3	4,3	7,0
Sep-21	0,8	2,1	1,8	1,0	2,5	3,4	1,6	2,5	4,6	6,6
Total	20,5	57,3	36,5	13,7	58,3	82,5	34,4	56,9	107,4	182,7

Sumber: data diolah dari ONS-UK Trade: September 2021

Data diatas menunjukkan bahwa impor beberapa komoditi barang UE ke Inggris tetap lebih dominan dibandingkan ekspor barang Inggris ke Uni Eropa pasca Brexit. Pada data tersebut, Inggris mengimpor barang dari UE dengan rata-rata sebesar €78,62 miliar pada tahun 2019-2021 untuk lima komoditas utama Inggris dengan UE seperti mesin dan peralatan transportasi, bahan kimia, makanan dan hewan hidup, bahan bakar dan bahan manufaktur. Sementara, untuk ekspor barang Inggris rata-rata hanya sebesar €51,42 miliar sejak tahun 2019 hingga 2021 dengan nilai ekspor lebih dominan pada komoditi bahan bakar saja sedangkan komoditi utama lainnya mengalami defisit seperti mesin dan peralatan transportasi, bahan kimia, dan bahan manufaktur lainnya (*Ibid*).

Berdasarkan jumlah komoditi yang lebih dominan di impor Inggris dibandingkan diekspor Inggris ini membuktikan bahwa Inggris sangat bergantung pada produk yang dihasilkan oleh Uni Eropa. Selain bergantung pada komoditi barang industri yang telah digambarkan pada tabel 4.1. Inggris juga sangat tergantung pada komoditi hasil pertanian seperti daging (55%), Unggas (55%), makanan olahan kecuali minuman (26%), dan gula (25%) yang lebih banyak diproduksi oleh Negara anggota UE seperti Jerman, Perancis dan Belanda (*European Commission, 2020*).

Kesepakatan yang dicapai antara Inggris dan Uni Eropa dalam perjanjian perdagangan dan kerjasama dalam sektor perdagangan barang telah menetapkan tarif nol dan kuota nol bagi semua sesuai dengan aturan asal masing-masing Negara. Perjanjian ini dibentuk berdasarkan komitmen prinsip WTO yang memfasilitasi perdagangan serta mengatasi hambatan non-tarif dalam impor maupun ekspor barang. Selain itu, perjanjian ini telah menetapkan hambatan teknis dalam perdagangan barang antara Inggris dan Uni Eropa yang diatur berdasarkan sistem pasar masing-masing Negara (*International Treaty*, 2021).

Walaupun kesepakatan perdagangan antara Inggris dan UE telah tercapai dalam sektor barang. Inggris akan tetap menerima konsekuensi dari keputusannya meninggalkan Pasar Tunggal karena selama menjadi anggota Uni Eropa, Inggris memiliki kebebasan penuh dalam akses perdagangan tanpa hambatan tariff maupun non-tarif. Akan tetapi, Pasca Brexit akses perdagangan barang Inggris dengan Uni Eropa mengalami beberapa perubahan dalam bentuk regulasi yang disepakati oleh kedua negara seperti adanya penetapan untuk pemeriksaan diwilayah perbatasan untuk mengecek setiap barang yang memenuhi standar kesehatan dan ketentuan dari negara asal. Hal ini tentunya akan berpengaruh besar terhadap perdagangan Inggris, karena Uni Eropa dapat mengurangi pasokan barang ke Inggris akibat adanya hambatan regulasi yang membutuhkan waktu cukup lama agar barang dapat diterima oleh masyarakat Inggris maupun Uni Eropa. Dampak lainnya yakni kedua negara ini akan beralih pada produk yg berasal dari dalam negeri sehingga pendapatan Inggris maupun Uni Eropa terhadap ekspor barangpun akan mengalami penurunan (Abi Casey, 2021).

Dampak Brexit terhadap perdagangan Inggris dengan UE berdasarkan pandangan ekonomi liberal menyebabkan perdagangan Inggris justru mendapatkan keuntungan karena pasca Brexit, Inggris memiliki kesempatan yang luas dalam menjalin kerjasama dengan negara Non-UE seperti amerika serikat, china dan lain-lain tanpa harus terikat dalam aturan Pasar Tunggal UE. Hal ini tentunya dimanfaatkan oleh Inggris untuk memperbaiki perekonomiannya yang mengalami kemerosotan pasca Brexit karena sebagian besar Inggris lebih banyak mengekspor barang ke Negara Non-UE dibandingkan ke UE (Hannah Donnarumma, 2021).

Dampak Brexit terhadap perdagangan barang Inggris dengan Uni Eropa menurut Syed Haider Ali Zaidi seorang ahli manajemen resiko ekonomi, memproyeksikan bahwa Brexit memberikan dampak positif bagi strategi Perdagangan Inggris karena keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa membuka peluang yang besar bagi Investasi Asing dalam skenario Brexit jangka panjang. Sementara, untuk dampak negatifnya yakni peluang untuk perdagangan Inggris dengan Negara UE akan mengalami penurunan yang cukup rendah dengan komitmen WTO. Ini artinya perdagangan Inggris akan mengalami kehancuran dimasa depan yang akan mempengaruhi dinamika ekonomi negara-negara berkembang yang menjaga hubungan ekonominya dengan Inggris seperti Nigeria, Afrika Selatan dan beberapa negara persemakmuran lainnya mengalami penurunan terhadap Ekspor Inggris ke negara-negara tersebut (Syed Haider Ali Zaidi, ddk, 2017).

2. Dampak Brexit terhadap Perdagangan Jasa

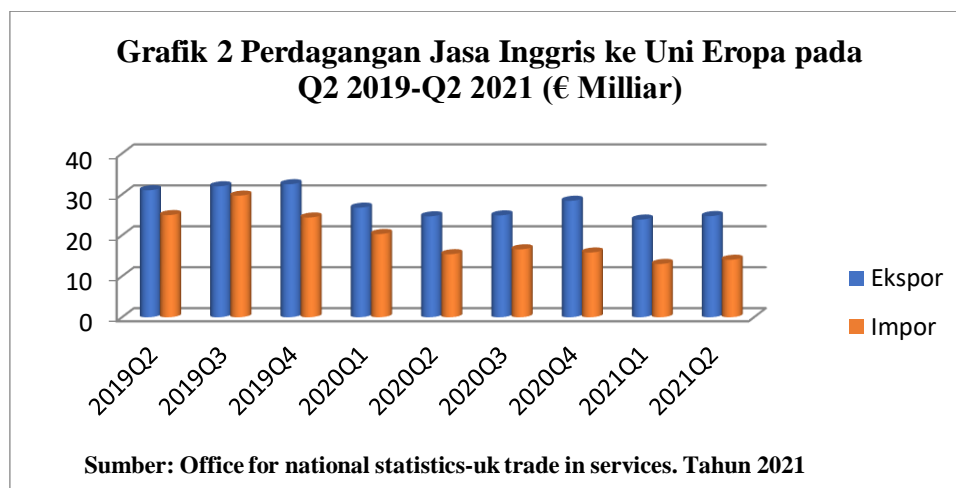
Dampak Brexit terhadap perdagangan Jasa berdasarkan pandangan ekonomi liberal mempengaruhi mekanisme pasar Inggris khususnya dalam permintaan dan penawaran jasa Inggris oleh Uni Eropa yang akan mengalami penurunan akibat dari

adanya ketentuan dan hambatan regulasi dalam perdagangan jasa yang diberlakukan kembali dalam kesepakatan perjanjian perdagangan dan kerjasama antara Inggris dengan Uni Eropa pasca Brexit. Hal ini tentunya berdampak buruk terhadap ekonomi Inggris karena perdagangan jasa Inggris telah menyumbang surplus perdagangan hampir 80% dari ekonominya dengan akses bebas hambatan ke Pasar Tunggal Uni Eropa (Ilze Jozepa, Matthew Ward, and Daniel Harari, 2019 (hal 5-6)).

Sebelum Brexit, Inggris memiliki akses ke Pasar Tunggal lebih dari 500 juta konsumen dalam perdagangan jasa, akses data bebas dengan anggota UE lainnya, dan memiliki hak dalam pembuatan paspor yang memungkinkan perusahaan jasa keuangan dapat menjual jasa nya di Negara anggota UE lainnya tanpa harus membangun cabang di Negara tersebut. Hak paspor ini merupakan salah satu alasan yang sangat penting dibalik pemanfaatan Inggris sebagai basis Uni Eropa untuk perusahaan keuangan Amerika Serikat dan Jepang (Olga Pindyuk, 2019 (hal 8)).

Pasca Brexit hambatan dalam perdagangan akan diberlakukan kembali dan Inggris tidak lagi memiliki akses bebas ke Pasar Tunggal karena akses perdagangan jasa telah diatur berdasarkan ketentuan standar dan peraturan nasional yang berbeda dalam setiap Negara. Adapun peraturan nasional yang diatur mengenai perizinan, kuota, kualifikasi profesional, dan imigrasi bagi penyedia layanan jasa asing yang memasuki pasar Inggris. Akibatnya, Inggris akan menjadi tujuan pasar yang kurang menarik bagi perusahaan yang menggunakan jasanya sebagai basis untuk investasi di Pasar Tunggal UE karena pasokan jasa Inggris akan dibatasi berdasarkan kuota yang dibutuhkan oleh Negara anggota UE (Ilze Jozepa, Matthew Ward and Daniel Harari, 2019 (hal 16)).

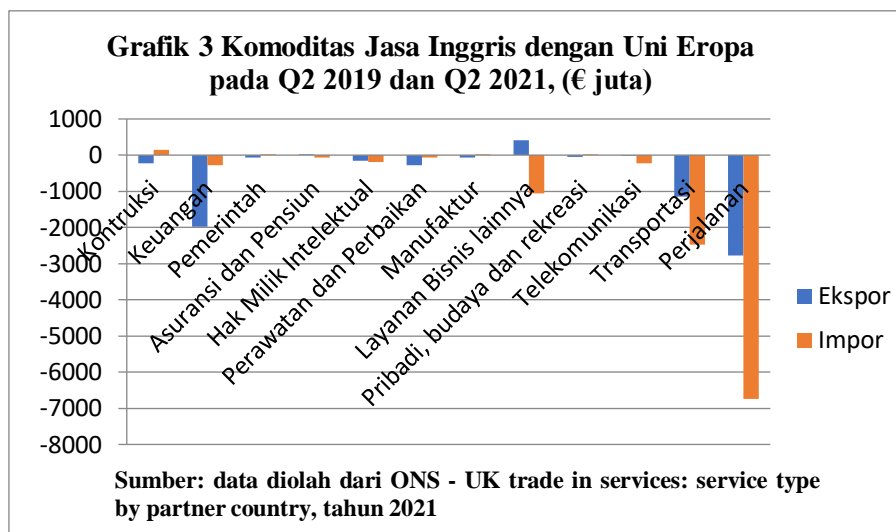
Perdagangan jasa Inggris telah mengalami penurunan akibat adanya pemberlakuan kembali terhadap hambatan dalam perdagangan lintas batas yang mengalami peningkatan pasca Brexit dan ditambah lagi dengan ketidakpastian politik selama referendum dan kegagalan pemerintah Inggris untuk mendapatkan konsensus internal mengenai kesepakatan dalam perdagangan jasa. Sehingga membuat perdagangan Jasa Inggris dengan Uni Eropa mengalami penurunan pasca Brexit yang dapat dilihat pada grafik berikut:



Data di atas menunjukkan bahwa perdagangan jasa mengalami penurunan pasca brexit yang terlihat pada ekspor jasa yang menurun sebesar 23,857 miliar euro atau ekspor telah berkurang sekitar 4,582 miliar pada kuartal 1 tahun 2021 setelah kuartal 4 tahun 2020. Sementara, untuk impor jasa telah mengalami penurunan sebesar 13,012

atau nilai impor telah menurun sekitar 2,792 miliar euro pasca Brexit. Turunnya nilai perdagangan jasa ini disebabkan oleh akses perdagangan jasa yang mengalami hambatan pada perdagangan lintas batas serta ditambah lagi dengan dampak dari virus corona (COVID-19). Walaupun perdagangan jasa menurun, sektor jasa tetap mengalami surplus perdagangan ketika berdagang dengan Uni Eropa. (Natalie Jefferies, 2021).

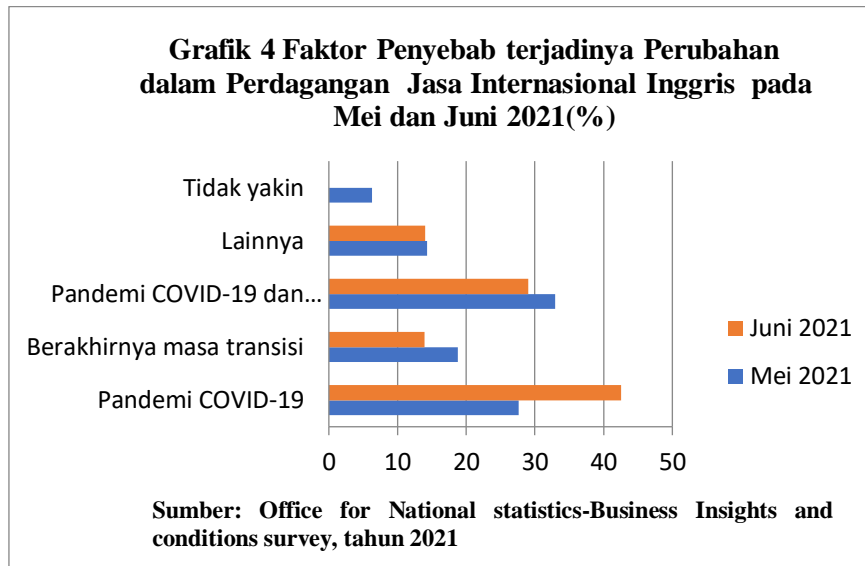
Selain itu, perdagangan jasa memiliki beberapa komoditas utama seperti jasa keuangan, jasa transportasi serta layanan bisnis lainnya menyumbang hampir setengah dari ekonomi Inggris. Inggris juga merupakan mitra perdagangan terbesar dalam sektor jasa terutama dalam jasa perjalanan serta jasa transportasi. Adapun komoditas perdagangan jasa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



Data di atas menunjukkan bahwa ekspor jasa perjalanan berupa usaha perjalanan wisata, pengurusan paspor dan visa, serta penginapan dan jasa lintas batas Inggris ke Uni Eropa mengalami penurunan yang cukup tinggi pada triwulan 2 tahun 2021 dengan total ekspor perjalanan yang turun sebesar €6,9 juta dan impor sebesar €11,1 miliar jika dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2019. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat akses perjalanan setiap masyarakat Inggris ke Uni Eropa menjadi terbatas. Sementara untuk ekspor jasa transportasi berupa transportasi udara dan darat yang melintasi perbatasan juga mengalami penurunan sekitar €1,14 juta dan impor turun sebesar €2,47. Berkurangnya jasa perjalanan internasional berpengaruh besar terhadap kemampuan bisnis pasca Brexit. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Inggris menghadapi dua masalah sekaligus yakni konsekuensi keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan untuk perdagangan jasa dan ditambah lagi dengan masalah virus korona yang sangat berkontribusi terhadap penurunan dalam perdagangan jasa antara Inggris dengan Uni Eropa. (*Ibid*).

Selama pandemi, Inggris menghadapi berbagai hambatan dalam melakukan perdagangan jasa karena terdapat beberapa komoditas jasa yang bergantung pada pergerakan orang ketika melakukan perdagangan seperti jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa transportasi, jasa manufaktur serta konstruksi. Selain itu, ada juga komoditas layanan jasa lain yang melakukan perdagangan dengan jumlah yang besar serta melibatkan pergerakan orang untuk melintasi perbatasan seperti layanan bisnis lainnya, layanan keuangan, jasa asuransi dan pensiun serta layanan intelektual. (Dean Scott, 2021).

Selain itu, menurunnya perdagangan jasa Inggris tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Akan tetapi, juga dipengaruhi oleh *Coronavirus* (COVID-19) yang membuat arus perdagangan jasa menjadi terhambat sehingga terjadinya penurunan terhadap perdagangan jasa. Hal ini didukung oleh laporan proporsi bisnis yang menyatakan pandemik COVID 19 sebagai penyebab utama dalam perubahan perdagangan jasa internasional yang dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik tersebut menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan salah satu penyebab paling signifikan yang membawa perubahan dalam perdagangan jasa internasional Inggris yang meningkat dari 27,6% pada awal bulan Mei menjadi 42,5% pada awal bulan Juni 2021. Dalam periode yang sama, keluarnya Inggris dari Uni Eropa juga sebagai penyebab yang sedikit lebih rendah dengan persentase sekitar 18,8% menjadi 13,9% pada awal bulan Mei dan Juni 2021. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan yang sangat besar dalam perdagangan jasa Inggris dengan Uni Eropa akibat pandemic Covid-19. (*Ibid*).

Selain itu, ada Indikasi tambahan lain dari responden untuk *Survei International Trade in Services* (ITIS) pertriwulanan. Dimana para responden memberikan pendapat secara terperinci mengenai alasan terjadinya perubahan dalam perdagangan jasa yang berfokus pada tingkat dampak dari pandemi Covid-19 dan Brexit tahun 2021 terhadap perdagangan jasa. Pandemi Covid-19 telah membuat produk layanan jasa mengalami penurunan dalam tingkat permintaan maupun penawaran dari Negara anggota UE lainnya seperti jasa telekomunikasi dan layanan komputer, kekayaan intelektual, konstruksi, serta layanan rekreasi dan warisan. Sementara, Responden yang berpendapat bahwa perubahan perdagangan jasa dipengaruhi oleh Brexit sebagian besar menyatakan bisnis Inggris ke Uni Eropa akan mengalami kerugian akibat dari restrukturisasi dan relokasi dalam aspek bisnis ke negara Eropa lainnya khususnya dalam jasa keuangan dan komputer. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat signifikan dalam perdagangan jasa di Inggris, akibat pemberlakuan pembatasan terhadap perjalanan bisnis. (*Ibid*).

Kondisi perdagangan jasa pasca Brexit ini lebih sulit untuk diliberalisasi secara multilateral maupun bilateral karena adanya perbedaan yang signifikan antara sektor, kompleksitas cara perdagangan jasa, variasi dalam rezim regulasi dan berbagai

kepentingan lainnya. Sementara, liberalisasi dalam perdagangan jasa menuntut pemerintah untuk menyerahkan haknya dalam mengatur perdagangan secara politis. Kondisi ini akan membatasi serta menghambat akses perdagangan antar negara ketika Inggris meninggalkan UE, terutama adanya hambatan terhadap perdagangan jasa layanan bisnis lainnya yang merupakan komoditas ekspor terbesar Inggris ke Uni Eropa. (Ilze Jozepa, Matthew Ward and Daniel Harari, 2019)

Tidak seperti perdagangan barang, Perdagangan Jasa tidak dibatasi oleh hambatan tarif maupun pemeriksaan di perbatasan. Hambatan untuk perdagangan jasa secara eksklusif hanya menyangkut tentang hambatan regulasi atau birokrasi di belakang perbatasan atau yang dikenal dengan hambatan non-tarif. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah mengklasifikasikan hambatan dalam perdagangan jasa ke dalam lima kategori besar yakni tindakan kebijakan kepemilikan (persyaratan kewarganegaraan di dewan perusahaan), Pembatasan pergerakan orang (seperti persyaratan visa dan pembatasan kuantitatif), Tindakan diskriminatif lainnya (terkait dengan pajak, subsidi, atau pengadaan publik; standar nasional yang berbeda), Hambatan persaingan (kebijakan anti-trust, efek kepemilikan pemerintah). (OECD, 2017).

Dalam perdagangan jasa, Inggris akan menjadi negara ketiga berdasarkan tujuan penyediaan layanan di UE yang artinya akan ada perubahan besar dalam persyaratan atau perizinan perdagangan Jasa Inggris ke UE. Selain itu, penyedia layanan Inggris juga kehilangan akses bebas ke pasar UE karena harus tunduk pada aturan akses dasar yang ditetapkan oleh GATS yang mana aturan-aturan tersebut lebih terbatas dibandingkan dengan peraturan Pasar Tunggal. Berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai antara Inggris dan Uni Eropa mengenai perdagangan jasa telah menyepakati untuk saling memberikan pemasok jasa dan investor yang berkomitmen pada aturan WTO. Kesepakatan ini akan memberikan kepastian dan dukungan bagi perusahaan dan individu untuk terus berdagang dengan Uni Eropa supaya saling menguntungkan serta tetap mempertahankan hak Inggris untuk hidup sebagai Negara yang merdeka. (Ilze Jozepa, Matthew Ward and Daniel Harari, 2019 (hal 34)).

Walaupun kesepakatan dalam perdagangan jasa telah di sepakati agar saling menguntungkan. Namun, Inggris tidak dapat menghindari berbagai hambatan dalam perdagangan seperti peningkatan terhadap biaya perdagangan jasa yang akan mempengaruhi jumlah maupun volume perdagangan jasa di Inggris. Selain itu, hambatan perdagangan antara Inggris dan UE diperkirakan akan semakin meningkat pasca Brexit yang menyebabkan volume perdagangan jasa diperkirakan akan menurun ketitik yang lebih rendah dalam jangka panjang dibandingkan dengan skenario Inggris tetap berada di UE. (*Ibid hal 41*).

Dampak potensial yang mempengaruhi volume perdagangan mengakibatkan terjadinya perubahan biaya. Berdasarkan Analisis ekonomi jangka panjang, ekspor jasa Inggris ke UE diperkirakan mengalami penurunan lebih rendah sekitar 35% dalam skenario WTO yang telah disepakati oleh Inggris dan UE dalam perjanjian perdagangan dan kerjasama pasca Brexit. Sedangkan di bawah perjanjian perdagangan bebas (FTA) ekspor jasa Inggris diperkirakan turun sekitar 24% (HM Government, 2018). Disisi lain, dampak Brexit yang mempengaruhi perdagangan jasa Inggris baik melalui ekspor maupun impor dengan UE diperkirakan mengalami penurunan sekitar 61% dalam skenario FTA dan WTO atau tanpa kesepakatan (Monique Ebell, 2017).

Dampak Brexit terhadap perdagangan jasa telah membuat warga Inggris kehilangan akses bebas ke pasar tunggal Uni Eropa khususnya untuk jasa yang

melibatkan pergerakan orang seperti jasa perjalanan bisnis menjadi terbatas dan jasa keuangan juga tidak memiliki hak paspor ke Uni Eropa akibat Brexit. mekanisme pasar Inggris untuk sektor jasa akan diatur melalui ketentuan GATTs berdasarkan kesepakatan Inggris dengan UE dalam kesepakatan perjanjian perdagangan dan kerjasama (TCA). (Olga Pindyuk, 2019 (hal 7)

Dampak Brexit terhadap perdagangan jasa Inggris dengan Uni Eropa menurut Olga Pindyuk seorang ekonom di institut Wina menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa disinyalir akan mengalami kerugian karena perdagangan jasa akan mengalami hambatan dalam perdagangan lintas batas serta terjadi peningkatan relatif dalam proporsi layanan yang diberikan akan menjadi lebih mahal dalam Uni Eropa dimasa depan. Hal ini terjadi karena kesepakatan dalam perjanjian perdagangan dan kerjasama antara Inggris dengan Uni Eropa untuk perdagangan jasa diatur berdasarkan ketentuan GATTs yang membuat ruang lingkup untuk liberalisasi dalam sektor jasa menjadi terbatas akibatnya Uni Eropa akan mengganti Negara anggota Uni Eropa menjadi mitra dagang utamanya untuk sektor jasa ketika Inggris menjadi Negara ketiga untuk penyedia jasa dikawasan Uni Eropa. (*Ibid hal 8*)

Kesimpulan

Kesepakatan dalam perjanjian perdagangan dan kerjasama Inggris dengan Uni Eropa menetapkan bahwa seluruh perdagangan dalam sektor barang akan dikenakan tariff nol dan kuota nol dengan ketentuan barang harus sesuai dengan standar keamanan dari masing-masing Negara. Sedangkan untuk perdagangan jasa akan mengikuti ketentuan umum yang diatur dalam perdagangan bebas sesuai dengan prinsip WTO. Dalam hal ini perdagangan jasa akan mengalami hambatan dalam perdagangan lintas batas dengan pengetatan pemeriksaan di wilayah perbatasan mengenai kualifikasi profesional jasa yang diperdagangkan antar kedua Negara. Kesimpulannya dampak Brexit terhadap perdagangan Barang dan Jasa Inggris dengan Uni Eropa tahun 2021 akan mengalami penurunan di awal tahun 2021 karena adanya ketidakpastian Brexit yang berlangsung selama bertahun-tahun serta pandemi Covid-19 yang membuat Inggris membatasi ekspor maupun impor dari Uni Eropa. Akan tetapi, pada bulan Februari-Maret Perdagangan Inggris mengalami pemulihan dari kemerosotan tersebut.

Daftar Pustaka

- Abi Casey. 2021. *UK Trade : January 2021*. Office For National Statistics. Tersedia di <https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/uktrade/january2021>
- Ali M. El- Agra. 1989. *The Theory and Measurement of International Economic Integration*. Amerika: Edisi 1
- D. Clark. 2021. *Value UK-EU Trade in Goods 1997-2021*. Tersedia di <https://www.statista.com/statistics/284750/united-kingdom-uk-total-eu-trade-in-goods-by-trade-value/#:~:text=In%20January%202021%2C%20the%20value,in%20the%20provided%20time%20period>

- EFTA. 2010. *A Short Introduction to 50 years of EFTA*. Tersedia di <https://www.efta.int/sites/default/files/publications/fact-sheets/General-EFTA-fact-sheets/efta-50-years.pdf>
- European Commission. 2020. *EU-UK Trade and Cooperation Agreement*. Tersedia di https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-uk_trade_and_cooperation_agreement-a_new_relationship_with_big_changes-brochure.pdf
- European Commission. 2020. *EU-UK Trade and Cooperation Agreement: protecting European interests, ensuring fair competition, and continued cooperation in areas of mutual interest*. Tersedia di https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531
- European Commission. 2008. *A Common Immigration Policy for Europe*. Tersedia di https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_08_402
- European Movement International. 2016. *The consequences of a British exit from the European Union*. Tersedia di https://europeanmovement.eu/wp-content/uploads/2016/05/EMI_16_PolicyPosition_Brexit_17_VIEW_FINAL.pdf
- EU Referendum: UK votes to leave the EU*. Tersedia di https://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results
- HM Government. 2018. *EU Exit: Long-term Economic Analysis*. Tersedia di https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760484/28_November_EU_Exit_-_Long-term_economic_analysis__1_.pdf
- Hannah Donnarumma. 2021. *UK Trade: September 2021*. Tersedia di <https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/uktrade/september2021>
- Ilze Jozepa, Matthew Ward and Daniel Harari. 2019. *Trade in services and Brexit*. House of Commons Library, No 8586.
- International Treaty tersedia <https://www.gov.uk/government/publications/agreements-reached-between-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-and-the-european-union/summary-explainer>
- Marilyn Thomas. 2021. *The Impacts of EU exit and the Coronavirus on UK trade in Goods*. Tersedia di <https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/articles/theimpactsfofeuexitandthecoronavirusonuktradeingoods/2021-05-25>
- Matthew. 2021. *The UK's Contribution to the EU Budget*. House of commons Library, No. CBP 7886.
- Matthew Ward. 2020. *UK trade, 1948-2019: statistics*. House of Commons Library. No CBP 8261. Hal 9
- Monique Ebell. 2017. *Will New Trade Deals Soften the Blow of Hard Brexit?*. Tersedia di <https://www.niesr.ac.uk/blog/will-new-trade-deals-soften-blow-hard-brexit>
- Natalie, Jefferies. 2021. *The Impacts of EU Exit and Coronavirus (COVID-19) on UK trade in services: November 2021*. Tersedia di <https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/articles/theimpactsfofeuexitandcoronaviruscovid19onuktradeinservices/november2021>
- Nauro Campos, Fabrizio Coricelli. 2015. *Why did Britain join the EU? A new insight from economic history*. Tersedia di <https://voxeu.org/article/britain-s-eu-membership-new-insight-economic-history>

- Olga Pindyuk. 2019. *The Future Of Uk Services Trade Post-Brexit:Unlikely To Be Bright*. Tersedia di <https://wiiw.ac.at/the-future-of-uk-services-trade-post-brexit-unlikely-to-be-bright-dlp-4961.pdf>
- Razzen Sally. 1998. *Classical Liberalism and International Economic Order*. Routledge Advances in International Political Econom. HB95.S25
- Syed Haider Ali Zaidi, ddk. 2015. *Brexit: A review of impact on future of United Kingdom outside the European Union*. IJMRRM International Journal of Modern Research in Management, Vol.1, No. 1.
- UK Parlemt. 2013. *The EEC and the Single European Act*. Tersedia di <https://www.parliament.uk/about/livingheritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliament-and-europe/overview/britain-and-eeec-to-single-european-act/>.